

**PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI KATALISATOR MENUJU KEMAKMURAN BERSAMA  
DI ERA GLOBALISASI DAN OTONOMI DAERAH**

Oleh:  
Akhmad Darmawan<sup>1</sup>

**ABSTRAK**

Proses Globalisasi dan gerak riak otonomi daerah sudah menjadi urat nadi kehidupan bangsa Indonesia. Hampir setiap aspek kehidupan kita sebagai bangsa tidak terlepas dari dua proses tadi. Globalisasi dan otonomi daerah memiliki kesamaan visi, yaitu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap anggota masyarakat dalam mencapai kemakmuran.

Semangat globalisasi dan otonomi ini tentunya memerlukan suatu proses kemandirian yang penuh dari para pelakunya. Perilaku kemandirian akan dapat dikembangkan melalui proses pendidikan seperti kewirausahaan. Kewirausahaan berarti setiap pelaku bersedia untuk selalu belajar dan bekerja untuk suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan semangat yang tinggi. Perilaku wirausaha/entrepreneur ini akan menghasilkan budaya/etos kerja yang tinggi pada setiap masyarakat, sehingga proses pembangunan di Indonesia akan menjadi lebih cepat.

Peper ini akan mengupas mengenai pendidikan kewirausahaan sebagai katalisator dalam percepatan proses pembangunan, melalui peran serta masyarakat yang telah memiliki jiwa dan semangat entrepreneur.

kata kunci: *globalisasi, otonomi, kemandirian, kewirausahaan*

---

<sup>1</sup> Dosen fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Purwokerto

## **I. Pendahuluan**

Otonomi Daerah sering diartikan sebagai pemindahan kewenangan pusat kepada daerah. Dalam hal ini berarti beberapa kewenangan yang semula dimiliki oleh pemerintah pusat akan berpindah ke pemerintah yang lebih rendah, di Indonesia adalah Pemerintah Kota/Kabupaten. Sudah bukan rahasia umum bahwa keinginan adanya otonomi daerah merupakan sebuah tuntutan yang mendesak, dimana peran serta masyarakat atau pemerintah kota/kabupaten menjadi bagian yang sangat menentukan atau mempunyai posisi kunci. Padahal selama pembangunan masa orde baru hal ini tidak mungkin terjadi, karena semua kebijakan pembangunan di atur oleh pemerintah pusat dalam hal ini Bapenas menjadi pusat penyeragaman proyek-proyek pembangunan di daerah. Pemerintah daerah hanya menjadi kepanjangan dari pemerintah pusat saja, namun tidak pada era otonomi daerah. Apalagi globalisasi pasar sudah menjadi bagian urat nadi perekonomian, dimana semua barang dapat keluar masuk tanpa mengalami hambatan yang berarti. Untuk itu pemerintah daerah, pusat dan semua pelaku ekonomi harus bekerja sama dalam memajukan perekonomian dimasa yang akan datang.

Thomas L. Friedman, dalam bukunya *The Lexus and the Olive Tree* (2002), menyatakan globalisasi telah menggantikan Perang Dingin. Globalisasi bukan hanya sebuah fenomena atau suatu kecenderungan yang terjadi. Globalisasi mencakup terintegrasinya pasar, negara bangsa dan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu suatu sistem yang memungkinkan individu, korporasi, negara bangsa menjangkau dunia lebih cepat, murah dan akan mennggilas mereka yang tertinggal atau tidak menyesuaikan diri. Gagasan yang memicu globalisasi ialah kapitalisme pasar bebas, artinya semakin terbukanya ruang untuk pengaturan oleh kekuatan pasar dan semakin terbuka perekonomian untuk persaingan dan perdagangan bebas, semakin marak perkembangan ekonomi. Globalisasi berarti penyebaran dari kapitalisme pasar bebas hampir ke setiap pelosok dunia dengan aturan main yaitu keterbukaan, deregulasi dan privatisasi perekonomian. Begitu suatu negara melangkah masuk ke dalam sistem globalisasi para elitnya harus memulai meninternalisasi perspektif integrasi dan membiasakan menempatkan diri dalam konteks global. Sistem globalisasi dibangun atas dasar tiga keseimbangan penting; (1) Keseimbangan diantara negara-negara bangsa (2) Keseimbangan antara negara bangsa dan pasar global (3) Keseimbangan antara Negara bangsa dan individu. Globalisasi meruntuhkan semua tembok yang membatasi gerak dan kemampuan akses oleh manusia, dan secara simultan

menciptakan jaringan dan memberikan kuasa lebih besar bagi individu untuk mempengaruhi pasar dan negara bangsa.

## **II. Peran dunia pendidikan dalam globalisasi dan otonomi daerah**

Dalam era globalisasi dan otonomi daerah, paradigma keunggulan komparatif yang berbasis pada sumber daya alam secara perlahan tapi pasti berubah menjadi keunggulan yang bersumber pada ilmu pengetahuan atau sumber daya manusia. Keunggulan suatu negara/daerah, akan terlihat jelas jika sumber daya manusia yang ada memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada menjadi lebih bernilai „*value added*“. Untuk itu peran dunia pendidikan menjadi semakin penting keberadaannya. Sistem Pendidikan nasional Indonesia merupakan subsistem dari pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional Indonesia mempunyai peran utama dalam mengelola pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai kekuatan sentral dalam dalam proses pembangunan. Melalui pendidikan, manusia Indonesia diharapkan menjadi individu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri meningkatkan taraf hidup lahir batin, dan meningkatkan peranannya sebagai pribadi, pegawai/karyawan, warga masyarakat, warga negara dan makhluk Tuhan.

Proses pendidikan dapat terjadi di mana saja, tidak terbatas hanya di lingkungan sekolah dan kampus. Perkembangan seseorang dimulai sejak kecil, remaja sampai dengan dewasa dalam lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, merupakan proses pendidikan yang menyeluruh yang tak dapat dipisahkan. Namun melekat dan terintegrasi dengan sendirinya. Berdasarkan pengorganisasian, struktur dan tempat terjadinya proses <sup>4</sup> Pannen, 1997 hal. 1-1

pendidikan, dikenal dua jenis lembaga pendidikan, yaitu pendidikan sekolah<sup>5</sup> dan pendidikan luar sekolah<sup>6</sup>.

Menurut Thomas Huxley<sup>7</sup> menyatakan bahwa hasil terbesar dari pendidikan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan ketika hal tersebut perlu dilakukan, apakah anda menyukai atau tidak menyukai. Secara makro hasil pendidikan nasional Indonesia adalah manusia Indonesia yang takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan terampil, tinggi budi pekertinya, kuat kepribadiannya, tebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Adapun secara mikro, hasil pendidikan yang diharapkan adalah berupa peningkatan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik<sup>8</sup>.

Sebagai suatu sistem, pendidikan tinggi di Indonesia adalah merupakan pendidikan yang lebih tinggi setelah pendidikan menengah pada jalur pendidikan sekolah. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dinamakan perguruan tinggi<sup>9</sup>. Berdasarkan keputusan menteri pendidikan nasional RI No. 045/U/2002 tentang kurikulum inti Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa secara mikro pada dasarnya mengarah pada basis kompetensi peserta didik. Kompetensi<sup>10</sup> adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di

bidang pekerjaan tertentu. Hasil akhir proses pendidikan tinggi yang berupa sarjanasarjana dalam berbagai bidang ilmu dan keahlian kemudian berkiprah di dalam masyarakat/lingkungan, diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/kesenian serta mengupayakan penggunaannya pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

## **II. Kewirausahaan sebagai kunci keberhasilan**

Sritua arief<sup>11</sup> (2002) mengemukakan bahwa sistem pendidikan nasional untuk kader-kader bangsa Indonesia di segala kegiatan ekonomi dan sosial harus sejak dini mengandung aspek-aspek:

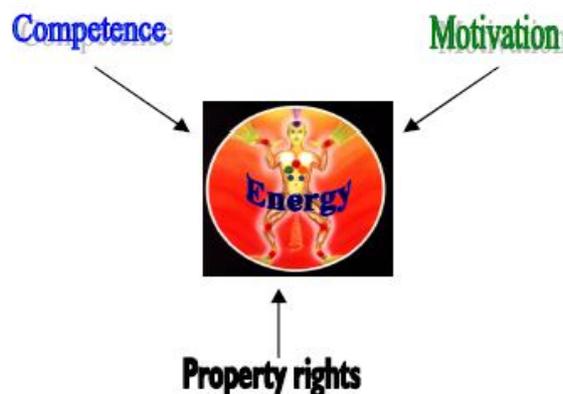
1. pendidikan etika dan budi pekerti
2. pendidikan yang menimbulkan kepekaan terhadap keadaan sosial dan lingkungan hidup.
3. pendidikan sejarah revolusi kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk menghancurkan kolonialisme dan para pendukungnya di dalam negeri yaitu kaum feodal.
4. pendidikan yang mengutamakan kebersamaan
5. pendidikan keahlian dan kerja nyata untuk kemanusiaan
6. pendidikan politik untuk menimbulkan idealisme penabdian untuk nusa dan bangsa
7. pendidikan agama dan ajaran agama dengan menitikberatkan dimensi sosial dari ajaran agama ini.

Lebih lanjut Sritua Arief (2002:198) menekankan pentingnya pendidikan kewirausahaan untuk menimbulkan aktor-aktor ekonomi yang tangguh di masa depan, yang mempunyai keterampilan tinggi serta bemosal. Dalam hal ini tentunya Perguruan Tinggi dituntut untuk berusaha mewujudkan tujuan-tujuan yang selaras dengan proses pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Sejak tanggal 29 Juni 2002, pemerintah lewat Keputusan Bersama Menteri Negara Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah dan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No No. 02/SKB/MENEG/VI/2000 dan No.4/U/SKB/2000, tentang Pendidikan Koperasi dan Kewirausahaan, telah mengamanatkan tentang perlunya ada kesungguhan dari semua pihak khususnya Perguruan Tinggi dalam memberikan pendidikan yang menitik beratkan pada kewirausahaan dan koperasi. Dengan adanya keputusan ini maka sudah merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi untuk mengkaji ulang dan menyusun strategi untuk mengejawantahkan kebijakan ini.

Memasukan kewirausahaan sebagai bagian dari program pendidikan ini adalah sudah sangat sejalan dalam rangka pengembangan ekonomi menuju kemakmuran. Hal ini dapat dilihat bahwa di Amerika sebagai tempat asal globalisasi sangat mementingkan keberadaan kewirausahaan. Bahkan Schumpeter (1911) dalam Ropke (2005) mempercayai bahwa kewirausahaan akan dapat merubah dunia ke arah yang lebih baik.

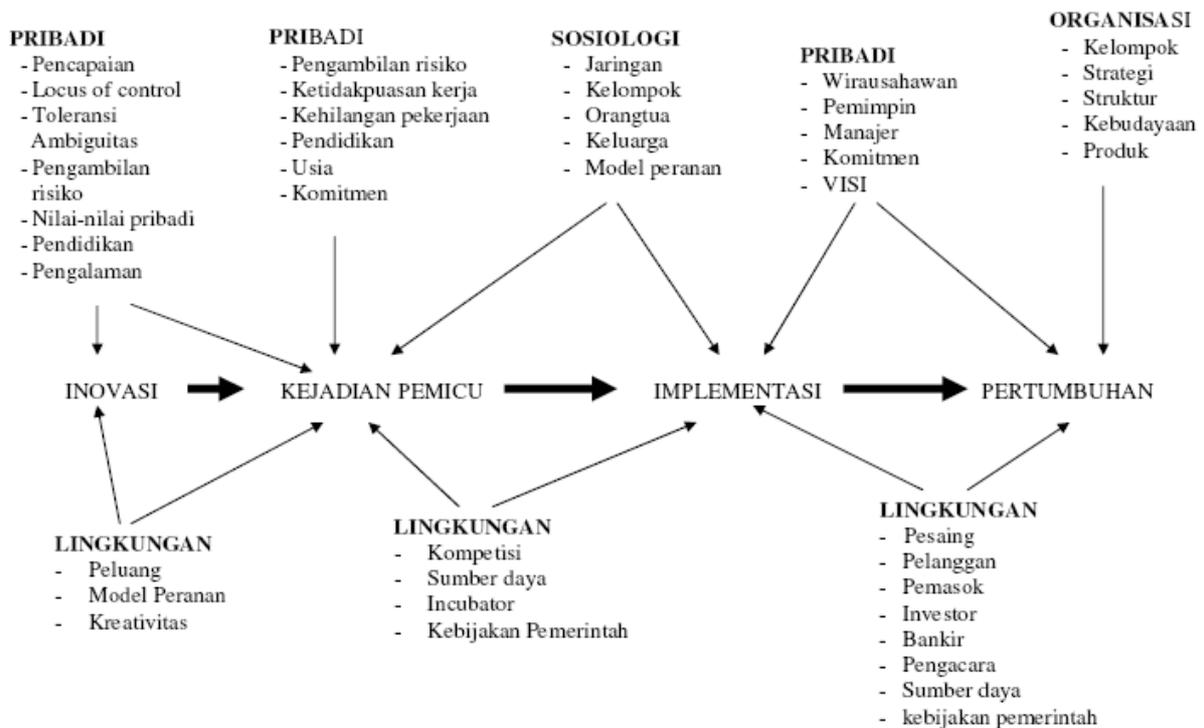
Namun Ropke(2005), menyatakan bahwa energi kewirausahaan akan timbul dengan tiga faktor pendukung harus dipenuhi, yaitu kompetensi, motivasi dan hak kepemilikan. lihat gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1  
Model Entrepreneurial

Kompetensi, property right (termasuk regulasi dan system nilai) dan motivasi berlaku secara berkesinambungan. Apabila salah satu komponen hilang atau nol maka enegy kewirausahaan juga akan menjadi nol dan terhenti.

Untuk itu dukungan semua dalam penciptaan masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan tidak dapat dikerjakan secara parsial, melainkan harus secara berkesinambungan. Seperti terlihat dalam gambar 2 bahwa proses kewirausahaan dapat akan terjadi jika melalui proses yang berkelanjutan.



Gambar 2: Model proses kewirausahaan  
 Sumber: Wiliam D Bagrave, dalam Kuratko 2001

Inovasi sebagai salah satu ciri adanya kewirausahaan, dapat diciptakan melalui sistem yang terintegrasi seperti yang digambarkan oleh Sri Harjanto dalam Ropke 2005.



Dengan lingkungan yang memungkinkan adanya inovasi ini, seperti dikemukakan Bygrave,1996, maka akan melahirkan perusahaan yang akan tumbuh secara terus menerus. Inovasi tidak hanya berlaku pada perusahaan saja, tetapi dapat dilakukan pada semua bidang, sehingga kemakmuran secara kolektif akan dapat terlaksana.

#### IV. Simpulan

Kewirausahaan telah diyakini dan dibuktikan di berbagai negara menjadi spirit dan pemicu pertumbuhan ekonomi terutama Amerika serikat sebagai penggagas globalisasi. Namun demikian kewirausahaan sebagai pendorong ekonomi ini tidak teraplikasikan pada sebagian negara berkembang, seperti Indonesia. Semangat globalisasi hanya bertumpu pada jargon pasar bebas saja, tanpa mengaplikasikan semangat kemandirian dan inovasi sebagai kajian utama (Schram :2003).

Dunia pendidikan dalam hal ini harus dapat berfungsi dapat mengajarkan sifatsifat kewirausahaan<sup>12</sup>. Dengan demikian setiap lulusan akan memiliki ilmu pengetahuan yang dapat diaplikasikan pada masyarakat sesuai dengan posisinya masing-masing. Baik itu sebagai

pengusaha (*entrepreneur*), atau pekerja, birokrat dan ilmuwan (*intrapreneur*). Dalam hal ini fungsi dunia pendidikan sebagai tempat mengasah kompetensi.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dalam hal ini harus mendukung terciptanya kondisi yang memungkinkan kewirausahaan berkembang. Dalam hal ini seperti dikemukakan Ropke:2005, pemerintah sebagai pendukung adanya jaminan pada property right. Masyarakat enterpreneurial (*enterpreneurial society*) akan terbentuk setelah melalui pendidikan kewirausahaan dengan didukung oleh jaminan akan adanya property right, dan motivasi yang lebih. Sehingga kemakmuran yang kita inginkan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua, 2002, Ekonomi Kerakyatan Indonesia Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Friedman, Thomas L, 2002, *Understanding Globalization: The Lexus and The olives*, diterjemahkan oleh Tim Penerbit ITB, Bndung
- Hisrich, Robert D et al, 2005, Entrepreneurship, 6 ed, McGraw-Hill
- Kian wie, Thee, dalam Syafri Harahap, Sofyan, 2002, Globalisasi Krisis ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan, Quantum, Jakarta,
- Kuratko, Donald F & Richard M Hodgets 2001, Entrepreneurship a Contemporary aproach, Thompson Learning.
- Pannen Paulina, dan Ida Malati, 1997, Pendidikan Sebagai Sistem dalam Mengajar diPerguruan Tinggi, Bagian 1, Pusat Antar Universitas-PPAI
- Ropke, Jochen 2005, *Innovation and stagnation in the small enterprise and cooperative sector of Indonesia*.
- SchramM, Carl J 2003, Building Entrepreneurial Economies.
- Steven Brown, W, 1991, 13 Kesalahan Dilakukan Manager dan cara menanggulangnya, Dahara Prize, Semarang